

Trend Korupsi Kepala Daerah; Studi pada Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara

Muhammad Harits¹
aismharits@gmail.com
Vito Ammar Gozali²
yitoammar@gmail.com
Nur Harfi Oktaviani³
yianiokta1234@gmail.com
Karina Dwi Agustina⁴
agustinakarina99@gmail.com

^{1,2,3,4} Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan negara karena akan mengganggu stabilitas negara. Tidak ada negara di dunia yang kebal bebas dari korupsi karena negara yang merupakan sebuah organisasi publik yang sangat besar di dalamnya terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Hanya saja kadarnya yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, seringkali terjadi korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara termasuk kepala daerah. Salah satu provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia adalah Sumatera Utara. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (literature review) baik sumber primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang buruk, budaya organisasi yang telah mengakar sejak lama, dan perbedaan kepentingan menjadi penyebab terjadinya tradisi korupsi Kepala Daerah Sumatera Utara.

Kata Kunci: korupsi; tradisi; kepentingan pribadi; kepala daerah.

ABSTRACT

Corruption is an act that is disserve to society and the state because it will disturb the stability of the country. There is no country in the world that is immune from corruption because the state which is a very large public organization in which there are many parties who have different personal interests but the levels are different from one country to another. corruption that involving state officials including regional heads are often in indonesia. One of the highest level of corruption in Indonesia is North Sumatera. This study uses qualitative methods and descriptive analysis on secondary data. Data are collected through literature review on primary and secondary sources. The result showed that bad work environment, organizational culture that has existed for a long time, and personal interest causes a corruption tradition in North Sumatera.

Keywords: corruption; tradition; personal interest; regional heads.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Saat ini, tindakan korupsi yang dilakukan pejabat tinggi negara semakin marak terjadi, hal ini terlihat dari banyaknya pejabat-pejabat yang tertangkap tangan telah menyalahgunakan wewenangnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Maraknya korupsi menjadi salah satu masalah yang serius bagi suatu negara karena dapat membahayakan stabilitas negara, menghambat pembangunan ekonomi, menyengsarakan masyarakat, dan merusak moralitas bangsa.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-89 dengan skor 38. Posisi Indonesia masih berada dibawah Singapura dengan skor 85, Brunei Darussalam dengan skor 63, dan Malaysia dengan skor 47. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara ASEAN lain. Sebenarnya, korupsi bukan merupakan hal yang baru di Indonesia tetapi sudah mengakar sejak lama. Bahkan, korupsi telah ada pada masa kerajaan Singasari, Majapahit, dan Demak yang akhirnya meruntuhkan kerajaan tersebut. Masa Orde Baru juga sangat melekat dengan istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi secara besar-besaran oleh para pejabat-pejabat negara dan aparatur keamanan negara pada saat itu. Korupsi itulah yang membawa pemerintahan soeharto kepada kelengseran dan perekonomian Indonesia sangat memburuk pada saat itu.

Korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan pejabat-pejabat di tingkat pusat,

tetapi juga melibatkan para kepala daerah di Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 79 kepala daerah di Indonesia pada tahun 2004-2018. Bahkan, angka tersebut dapat terus bertambah karena masih ada kasus yang datanya belum masuk dan kasusnya masih terus diusut. Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu terdiri dari 45 orang bupati, 21 orang Wali Kota, dan 13 orang gubernur.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang kepala daerahnya banyak terlibat kasus korupsi. Baru-baru ini, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Medan, Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar. Mereka diduga terlibat kasus penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.

Dzulmi Eldin bukan menjadi satu-satunya Kepala Daerah Sumatera Utara yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Abdillah terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan APBD Kota Medan 2002-2006. Wali Kota Medan, Rahudman Harahap juga tersangkut kasus korupsi dana Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan pada 2004- 2005.

Tidak hanya Wali Kota Medan yang terlibat kasus korupsi, tetapi juga Ramli Lubis (Wakil Wali Kota Medan), Syamsul Arifin (Gubernur Sumut), Hidayat Batubara (Bupati Mandailing Natal), Raja Bonaran Situmeang (Bupati Tapanuli Tengah), Gatot

Pujo Nugroho (Gubernur Sumut), OK Arya Zulkarnain (Bupati Batubara), Pangonal Harahap (Bupati Labuhanbatu) dan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu. Hal ini memunculkan pandangan bahwa pemerintahan daerah Sumatera Utara menjadi sebuah lingkaran setan bagi orang-orang didalamnya sehingga korupsi menjadi sebuah tradisi yang kerap dilakukan oleh para kepala daerah Sumatera Utara. Dengan banyaknya banyaknya kejadian di pemerintahan Sumatra Utara. Perlu sekiranya diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga memberikan kerugian bagi kepentingan umum dan negara. (Kartono:1983)

Kode etik

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode etik memiliki tujuan agar seorang yg memiliki profesi tertentu memberikan jasa serta pelayanan yang sebaik-baiknya kepada orang yang menerima jasanya. Kode etik mengatur seseorang agar bersikap profesional dengan mematuhi kode etik yang ada.

Lingkungan Kerja

1. Pengertian Lingkungan Kerja

Menurut Nitisemito (2000) lingkungan kerja merupakan segala hal yang terdapat di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

2. Faktor Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti, (2001:21) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor lingkungan kerja fisik dan faktor lingkungan kerja non fisik.

a. Faktor Lingkungan Kerja Fisik

Pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, keamanan, dan kebersihan.

b. Faktor Lingkungan Kerja Non-Fisik

Struktur kerja, tanggung jawab kerja, perhatian dan dukungan pemimpin, kerja sama antar kelompok, dan kelancaran komunikasi

Budaya Organisasi

1. Pengertian Budaya Organisasi

Menurut Djokosantosa (2003), budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan sebagai acuan berperilaku dalam organisasi untuk menciptakan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Sumber Budaya Organisasi

Menurut Robbins (2002: 283) suatu budaya organisasi berasal dari tiga sumber, yaitu:

2.1. Pendiri organisasi

Pendiri memiliki peranan penting dalam menarik karyawan. Sikap dan nilai seorang pemimpin akan diterima oleh karyawan dalam

organisasi dan tetap dipertahankan sepanjang pendiri berada dalam organisasi tersebut atau bahkan setelah pendirinya meninggalkan organisasi.

2.2. Pengalaman organisasi menghadapi lingkungan eksternal

Sikap dan nilai dapat terbangun akibat penghargaan organisasi terhadap tindakan dan kebijakan yang dibentuk

2.3. Hubungan kerja karyawan

Karyawan membawa harapan, nilai, sikap mereka kedalam organisasi. Sehingga hubungan kerja dapat merefleksikan aktivitas organisasi yang dapat membentuk sikap dan nilai.

3. Indikator Budaya Organisasi

Berikut adalah indikator budaya organisasi menurut Eugene McKenna (2005: 60):

a. Hubungan antara manusia dengan manusia

Hubungan antar manusia dengan manusia yaitu keyakinan para anggota organisasi bahwa mereka diterima secara benar dengan cara yang tepat dalam sebuah organisasi.

b. Kerjasama

Kerjasama adalah kemampuan seseorang pekerja untuk bekerja bersama dengan rekan kerja dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai mencapai daya guna yang sebesar-besarnya.

c. Penampilan karyawan

Penampilan karyawan adalah kesan yang dibuat oleh seseorang terhadap orang lainnya, misalnya keserasian pakaian dan penampilannya.

METODE PENELITIAN

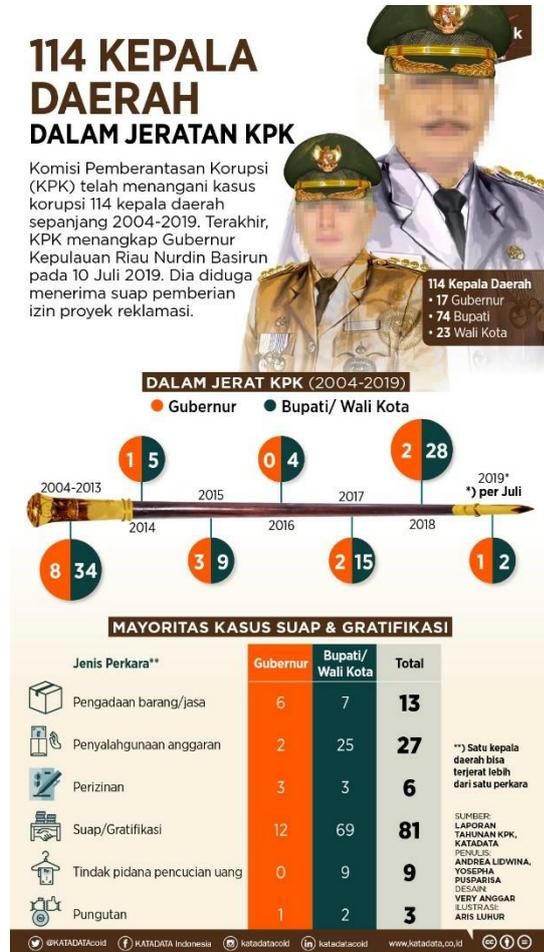
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sumber data sekunder. Informasi kami peroleh dari berbagai dokumen dan sumber berita yang dapat di akses pada laman web. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Penulisan karya tulis ini merujuk pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*literature review*) baik sumber primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Yang Melibatkan Kepala Daerah di Sumatera Utara

Maraknya kasus korupsi di Indonesia banyak menjerat kepala daerah. Berdasarkan data dari KPK pada Tahun 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 29 kali. Pihak yang terjerat beragam seperti DPR, DPRD, kepala negara, hingga aparatur negara. Namun, yang paling banyak terjerat adalah kepala daerah. Dari 29 kali penangkapan, 21 diantaranya kepala daerah. Faktor terbesar banyaknya kepala daerah tertangkap OTT adalah karena mahalnya ongkos politik. Terdapat 114 kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2004-2019. Kepala daerah melakukan korupsi dengan berbagai macam jenis

seperti, gratifikasi, suap-menyuap, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pencucian uang dan pungutan liar. Gambar 1. Data Kasus Korupsi oleh Kepala Daerah di Indonesia.



Sumber: (Katadata, 2019)

Berdasarkan data diatas, kepala daerah di Indonesia sering melakukan tindakan korupsi berupa gratifikasi sebanyak 81 kasus, kemudian disusul dengan penyalahgunaan anggaran sebanyak 27 kasus, pengadaan barang dan jasa sebanyak 13 kasus, pencucian uang sebanyak 9 kasus, perizinan sebanyak 6 kasus dan pungutan liar sebanyak 3 kasus

Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah di Indonesia masih sering menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi. Dengan wewenang dan kekuasaan yang mereka punya, mereka menghalalkan segala cara agar mencapai kepentingan pribadinya. Dari banyaknya kasus korupsi oleh kepala daerah di Indonesia, provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan tingkat korupsi yang tinggi. Setiap pergantian jabatan rentan terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Hal itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 1. Kepala Daerah di Sumatera Utara yang Terlibat Kasus Korupsi.

Nama	Jabatan	Tahun Jabatan	Kasus
Pangonal Harahap	Bupati Labuhanbatu	2016-2018	Terkait dengan proyek di PUPR
Gatot Pujo Nugroho	Gubernur Sumatera Utara	2011-2015	Terbukti memberikan suap kepada Keadilan Tata Usaha Negara di Medan, dan melakukan korupsi dana hibah dan bantuan sosial senilai Rp4 M.
Rahudman Harahap	Wali Kota Medan	2010-2013	Menyalah gunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama	Jabatan	Tahun Jabatan	Kasus
Robert Edison Siahaan	Wali Kota Siantar	2005-2010	Menyelewengkan Dana Rehabilitas/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar pada Tahun 2007 sebesar Rp343 M.
Fahuwusa Laia	Bupati Nias Selatan	2006-2011	Melakukan suap terhadap penyelenggaraan negara
Binahati Benedictus Baeha	Bupati Nias		Penyelewengan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Nias sebesar Rp3,7 M.
Syamsul Arifin	Gubernur Sumut	1999-2004 dan 2004-2008	Menyelewengkan dana kas daerah sebesar Rp57 M untuk kepentingan pribadi.
Abdillah	Wali Kota Medan	2000-2008	Pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan merek Morita dan penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan
Ramli Lubis	Wakil Wali Kota Medan	2005-2008	Melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di Medan dan penyalahgunaan APBD bersama dengan Wali Kota Medan.

Sumber: (Kompas, 2018)

Dari kasus-kasus yang telah terjadi, dapat dianalisis dari segi etika, lingkungan kerja, dan budaya organisasi.

Korupsi Ditinjau Dari Segi Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti adat atau kebiasaan. Etika dapat diartikan sebagai pola hidup individu atau kelompok yang baik yang berpengaruh pada orang lain. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala sesuatu yang sudah menjadi pola kebiasaan orang-orang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu wilayah atau kelompok masyarakat.

Menurut dari Bertens (2000), etika dibagi ke dalam dua teori :

- a) Teori etika deontologi, yaitu istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban. Karena itu etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.
- b) Teori etika teleologi, yaitu teori yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan tersebut.

Dilihat dari tinjauan teori etika deontologi, tindakan korupsi sudah sangat menyimpang dari kewajiban. Berdasarkan pendapat Huntington yang mana telah mendefinisikan tindakan korupsi sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, maka jika disambungkan dengan teori deontologi yang telah dikemukakan oleh Keraf sangatlah melanggar etika tersebut. Pejabat publik memiliki keharusan untuk tetap jujur dan tidak merugikan negara dengan sengaja, apalagi dengan maksud untuk menguntungkan individu melalui cara yang merugikan negara.

Lalu jika ditinjau melalui teori etika teleologi oleh Keraf, tindakan korupsi juga suatu tindakan yang buruk. Dalam teori etika teleologi, sesuatu dianggap baik atau buruk dapat dinilai dari tujuannya. Korupsi bertujuan untuk memperkaya diri atau menguntungkan suatu individu, tetapi mengakibatkan kerugian yang besar pada negara, sehingga dapat dinilai bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang buruk ditinjau dari teori etika teleologi.

Kasus yang terjadi di Medan, Sumatera Utara ini dapat diklasifikasikan ke dalam teori kode etik yang telah dikemukakan oleh Keraf. Dengan tertangkapnya Dzulmi Eldin yang menjabat sebagai Wali Kota Medan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Medan akan semakin kecil. Ditinjau dari etika deontologi, maka pemerintah kota medan dapat dinilai buruk dalam segi etika karena telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat publik dan tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik.

Bila kita kaitkan dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di kalangan Pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dapat secara jelas kita lihat bahwa para pelaku tindak korupsi rata-rata menjabat sebagai Wali Kota, namun dengan jabatan tersebut justru membuat mereka memanfaatkan jabatannya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dengan jabatan yang tinggi sebagai Wali Kota, tidak cukup untuk membuat para tindak korupsi untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadi,

Seperti kasus praktik korupsi yang menjerat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dalam kasus dugaan suap terkait proyek

dan jabatan di Pemerintahan kota (Pemko) Medan tahun 2019. Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan (OTT), dalam OTT tersebut KPK mengamankan tujuh orang dari berbagai unsur pejabat di lingkungan Pemko Medan, beserta uang Rp 200 juta. Sedangkan Rp 50 juta masih dibawa seorang ajudan Dzulmi Eldin bernama Andika, yang sampai saat ini belum menyerahkan diri. Menurut keterangan KPK, Dzulmi Eldin memerintahkan Syamsul Fitri untuk mencari dana dan menutupi akses dana non-budget perjalanan ke Jepang pada Juli 2019 tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Dari kasus ini dapat memperlihatkan bahwa dengan cukup tingginya jabatan sebagai Wali Kota, justru membuat para Pemerintah daerah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dinilai sangat menyimpang dari norma-norma yang di terima masyarakat.

Tinjauan dari Lingkungan Kerja

Kasus korupsi yang dapat dikatakan telah menjadi tradisi di kalangan Kepala Daerah Sumatra Utara dapat ditinjau dari sisi lingkungan kerja atau lingkungan organisasinya. Sesuai dengan pengertian lingkungan kerja itu sendiri bahwa lingkungan kerja adalah segala hal di sekitar pekerja yang dapat berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankannya. Begitu pula dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di kalangan Kepala Daerah Sumatra Utara. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dari lingkungan kerja tersebut.

Dapat kita kaji faktor lingkungan kerja non-fisik, dimana faktor-faktor ini dapat membentuk sebuah lingkungan kerja yang menyebabkan kepala-kepala daerah tersebut terjatuh kasus korupsi:

1. Struktur kerja

Di wilayah provinsi, pemegang kekuasaan tertinggi adalah gubernur. Di wilayah kabupaten/kota jabatan kepala daerah dipegang oleh seorang Bupati/Wali Kota. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah. Artinya kepala daerah memiliki kekuasaan yang cukup tinggi.

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004, menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki wewenang untuk menyusun serta mengajukan rancangan perda terkait APBD. Dari kasus-kasus yang menjerat para kepala daerah banyak disebabkan oleh penyelewengan dana APBD. Ini terbukti bahwa wewenang yang tertera dalam UU No.32 Tahun 2004 dapat mempermudah kepala daerah untuk melakukan penyelewengan dana.

2. Tanggung jawab kerja

Hal ini juga cukup berkaitan dengan struktur kerja, dimana kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun APBD yang akan dibahas dengan DPRD serta kepala daerah juga memiliki tanggung jawab atas penyerapan dana yang tertera pada APBD. Tidak jarang kejahatan yang dilakukan para kepala daerah adalah dengan membesarkan RAPBD yang tidak sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Sehingga terjadi penyerapan dana yang tidak sesuai dengan keperluan dana tersebut.

3. Perhatian dan dukungan pemimpin

Perhatian dan dukungan pemimpin dalam kasus ini lebih merujuk kepada pendahulu. Tidak lain adalah mantan kepala daerah yang sudah tidak lagi

menjabat sebagai kepala daerah. Tidak menutup kemungkinan bahwa adanya tukar wawasan yang dilakukan oleh calon-calon kepala daerah. Proses tersebutlah yang dapat memunculkan budaya korupsi dikalangan kepala daerah ini. Karena berdasarkan fakta di zaman ini bahwa biaya politik dapat dikatakan mahal.

4. Kerja sama antar kelompok

Kerja sama dalam kasus ini adalah kerja sama politik yang dilakukan oleh pendukung-pendukung calon kepala daerah. Seperti partai politik yang beraliansi dan mendukung calon kepala daerah ataupun seorang calon kepala daerah tersebut yang berasal dari anggota partai politik tersebut. Hal ini juga dimanfaatkan oleh partai politik tersebut untuk mengambil alih kekuasaan, maka tidak jarang para calon kepala daerah menerima dana siluman dari partai politiknya.

Tinjauan dari Budaya Organisasi

Salah satu yang dapat mempengaruhi budaya organisasi ialah lingkungan organisasi/lingkungan kerja yang sebelumnya sudah dibahas. Maka dari itu, dua pembahasan ini cukup berkaitan. Hal-hal yang terdapat di lingkungan kerja dapat menumbuhkan suatu budaya organisasi, terlebih jika faktor-faktor lingkungan kerja adalah yang negatif, maka budaya yang terbangun adalah budaya yang negatif. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa konsep yang sama atau bersinggungan, seperti indikator dari budaya organisasi yakni:

1. Hubungan antara manusia dengan manusia
2. Kerjasama
3. Penampilan karyawan

Poin kesatu dan kedua sudah sangat jelas dipaparkan pada lingkungan kerja. Sehingga yang akan difokuskan di pembahasan ini adalah dari mana sumber budaya organisasi itu muncul.

1. Pendiri organisasi

Dalam kasus ini dikarenakan kepala daerah merupakan organisasi pemerintahan, maka pendirinya adalah sebuah negara. Sehingga pendiri disini merujuk kepada pendahulu, seperti yang disinggung pada pembahasan lingkungan kerja. Tidak jarang proses korupsi ini pertama menjerat kepala daerah, sehingga kekosongan jabatan tersebut diduduki oleh sang wakil kepala daerah, namun setelah wakil kepala daerah tersebut menduduki jabatan tersebut, ia pun ikut terjerat dalam kasus korupsi. Kasus ini seperti sudah menggambarkan jelas bahwa sudah terbentuk sebuah budaya organisasi di kalangan kepala daerah.

2. Pengalaman organisasi menghadapi lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal yang dapat kami tangkap di sini adalah seperti kelompok partai politik. Partai politik di sini memiliki peran untuk mendukung calon kepala daerah, sehingga adapun hal-hal yang dilakukan oleh calon untuk 'memuaskan' partai politiknya. Hal ini bertujuan agar calon kepala daerah ini tetap diberi dukungan dalam bentuk apapun. Akibatnya budaya ini terbentuk agar sang kepala daerah dapat bertahan di kedudukannya.

3. Penampilan karyawan

Menurut kami dalam hal ini, penampilan karyawan dapat dikatakan juga penampilan pekerja, dimana penampilan ini akan membuat kesan pertama. Sehingga kepala daerah pasti

akan membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tergolong mewah, sehingga hal ini dapat mendorong akan kebutuhan biaya untuk membeli barang-barang tersebut.

PENUTUP

Korupsi adalah perilaku seseorang yang menyimpang dari kewajibannya dengan menggunakan wewenang dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Kasus korupsi berantai yang terjadi di Sumatra Utara memiliki beberapa faktor. Pertama dikarenakan adanya etika bekerja yang kurang baik dalam pemerintahan Sumatra Utara. Terlihat dari kasus Dzulmi Eldin sebagai Wali Kota Medan yang mencontohkan etika yang buruk yaitu melakukan tindakan korupsi, kemudian kasus tersebut berulang pada wakil Wali Kota dari Dzulmi Eldin. Faktor kedua adalah adanya pengaruh dari lingkungan kerja non-fisik yang tidak sehat seperti kewenangan yang besar dalam rancangan perda terkait APBD, pemberian tanggung jawab kepada kepala daerah untuk menyusun APBD, adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah sebelumnya yang terjerat kasus korupsi, dan terjadinya kerja sama dari berbagai pihak. Faktor terakhir adalah adanya pengaruh dari budaya organisasi yang negatif.

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan masyarakat Indonesia adalah agar lebih perhitungan dalam memilih pemimpin. Sebelum memilih pemimpin butuh mengetahui latar belakang sosok yang ingin kita pilih. Contohnya seperti memerhatikan track record perjalanan politiknya, siapa saja orang yang kebersamai sosok tersebut,

dan hal lain yang dapat berdampak buruk bagi negara agar hal serupa tidak terjadi. Setelah terpilihnya pemimpin pada suatu daerah, masyarakat juga perlu aktif dalam mengawal apa yang dilakukan oleh pemuka daerah tersebut sebelum kasus-kasus seperti korupsi ini tidak terjadi bahkan menjadi tradisi. Pemerintah Indonesia juga perlu menguatkan peran KPK sebagai lembaga khusus untuk mengatasi korupsi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Alex. S. Nitisemito. (2002). *Manajemen Personalia*. Edisi Revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andriansyah, Anugrah. (2019). *Tradisi Gelap Praktik Korupsi Kepala Daerah di Medan*. Accessed on November 28, 2019 from <https://www.voaindonesia.com/a/tradisi-gelap-praktik-korupsi-kepala-daerah-di-medan/5126869.html>.
- Bahari, Yuda Rian. (2019). *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("Bukan") Budaya Indonesia*. Accessed on November 30, 2019 from <https://www.kompasiana.com/yudarianbhr54/5cbaf417cc52837d7e04ab00/korupsi-kolusi-nepotisme-bukan-budaya-indonesia?page=all>.
- Bertens. K (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Eugene McKenna. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Hangga, Michael. (2018). *9 Kepala Daerah di Sumatera Utara yang Terjerat Korupsi*. Accessed on November 30, 2019 from <https://regional.kompas.com/read/2018/07/19/08421331/9-kepala-daerah-di-sumatera-utara-yang-terjerat-korupsi?page=all>.

- Hermawan, Bayu. (2018). *Korupsi Kepala Daerah Makin Kronis*. Accessed on December 2, 2019 from <https://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/12/22/pk4hgh318-korupsi-kepala-daerah-makin-kronis>.
- Kartono, Kartini. (1983). *Patologi Sosial*. CV Rajawali. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. (1992). *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mas' oed, Mohtar, (1994). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Yogyakarta: LP3ES.
- Musdaliva, Yana. (2015). *Struktur Lembaga Pemerintahan Kabupaten Kota dan Propinsi dan Penjelasannya*. Accessed on November 30, 2019 from <https://guruppkn.com/lembaga-pemerintahan-kabupaten-kota-dan-propinsi>.
- Moeljono, Djokosantoso. (2003). *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Robbins SP, dan Judge. (2002). *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat Hal 283.
- Sedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Taher, Andrian Pratama. (2019). *Indeks Persepsi Korupsi 2018: Indonesia Peringkat ke-89 Dunia*. Accessed on November 30, 2019 from <https://tirto.id/indeks-persepsi-korupsi-2018-indonesia-peringkat-ke-89-dunia-dfl9>.
- Katadata. (2019). *114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap* . Accessed on December 2, 2019 from <https://katadata.co.id/infografik/2019/07/18/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>.